

ANCAMAN KENAIKAN MUKA AIR LAUT BAGI NEGARA-NEGARA DI KEPULAUAN PASIFIK

Bayu Wahyudin
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email : bayuwahyudinn@gmail.com

ABSTRACT

The increase in the average temperature of the earth is experiencing global warming. Of the many impacts, sea level rise is one of the most important impacts because it can eliminate the existence of certain state entities. An island state with distinctive features and issued consisting of small islands is the party most threatened. This threat is slow but surely continues to haunt residents living in these island-states, for example the Pacific islands. The impact of this challenge is not only on the environment, but also on the social life of residents living in this area. If one day the area they now live in is completely submerged, then they must find a new place to live (climate change refugees). Therefore, the Pacific islands, specifically those who are members of the Melanesian Spearhead Group (MSG) and the Pacific Islands Forum (PIF), make various efforts in overcoming this problem. This paper uses the help of the green political paradigm (Green Politic) as a reference in seeing the phenomena associated with MSG and PIF in the Pacific countries.

Keywords: Pacific Islands, Global Warming, Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Islands Forum (PIF), Green Politic.

PENDAHULUAN

Kenaikan permukaan laut merupakan salah satu efek perubahan iklim yang paling nyata. Tingkat laut dapat meningkat dengan dua mekanisme yang berbeda sehubungan dengan perubahan iklim. Pertama, meningkatnya suhu global yang menyebabkan kenaikan suhu pada laut, sehingga air laut mengembang - mengambil lebih banyak tempat di cekungan samudra dan menyebabkan kenaikan tingkat air. Mekanisme kedua adalah pencairan es di yang kemudian menambahkan air ke laut. (National Oceanic and Atmospheric Administration, 2017 dalam Ratih Kumala Dewi, 2017). Beberapa dekade terakhir, keprihatinan dunia Internasional terhadap fenomena perubahan iklim global (global climate change) semakin tinggi, karena telah memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan kehidupan di muka bumi akibat meningkatnya temperatur bumi yang dikenal dengan pemanasan global (Latuconsina, 2010). Jika berbicara soal wilayah, Pasifik terbagi menjadi tiga berdasarkan ras/etnis yang ada di kawasan ini. Dimana masyarakat di wilayah ini merupakan kelompok yang masih cenderung tradisional dengan segala kearifan dan ikatan 'kekitaan' yang kuat. Masyarakat adat Pasifik Selatan secara tradisional dikelompokkan menjadi tiga (3) kelompok budaya utama: Melanesia, Polinesia dan Mikronesia. Polinesia terdiri dari Samoa, Tonga, Kepulauan Cook, Tokelau, Tuvalu dan Niue. Mikronesia terdiri dari Kiribati, Kepulauan Marshall, Palau dan Negara Federasi Mikronesia. Melanesia memiliki kelompok pulau terbesar dan sedikit lebih dari dua pertiga wilayah ini populasi. Ini

juga memiliki keanekaragaman hayati tertinggi dan paling beragam di wilayah ini. Polinesia dan Mikronesia sebagian besar terdiri dari pulau-pulau kecil yang terisolasi (Crocombe, 2001). Ketiganya disatukan oleh satu kata 'Pasifik', yang menjadi wilayah mereka tinggal hingga kini.

Pasifik kerap dianggap memiliki sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas (Kwa, 2012). Maka wilayah tersebut harus memiliki suatu strategi jitu yang mengedepankan kolaborasi dan kerja sama untuk bisa bersama-sama menangani ancaman kenaikan muka air laut akibat pemanasan global ini. Kerja sama berbagai pihak yang melibatkan aktor-aktor pada kawasan regional dan bahkan internasional rasanya dibutuhkan untuk mengatasi ancaman dan potensi tenggelamnya kawasan pasifik ini (Hauger 2015). Oleh karena itu, upaya-upaya mitigasi dan perubahan iklim yang berakibat pada naiknya suhu bumi dan meningkatkan muka air laut perlu lebih diintensifkan oleh negara-negara di kawasan pasifik. Pelibatan upaya tersebut harus secara masif yang menyentuh seluruh lapisan sosial yang ada.

Adanya kesamaan visi antar negara di wilayah pasifik, khususnya negara-negara yang tergabung dalam *Melanesian Spearhead Group (MSG)* dalam menyikapi ancaman dari kenaikan muka air laut sangat diperlukan. Namun sayangnya, diantara negara-negara ini kerap terjadi perbedaan pandangan dan sikap berlawanan satu sama lain. Banyak faktor yang bisa menyebabkan negara-negara di kawasan ini terkesan tidak kompak dalam menghadapi ancaman perubahan iklim khususnya kenaikan muka air laut. Salah satunya adalah perbedaan kepentingan dan adanya tujuan-tujuan tertentu dari suatu negara, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan kepala negaranya. Seharusnya, hal tersebut tidaklah terjadi. Ketika banyak masyarakat di suatu negara merasakan ancaman yang disebabkan oleh perubahan iklim, maka pemerintah negara tersebut harus mengedepankan kepentingan masyarakat tersebut sebagai kepentingan nasional. Bukan justru mementingkan ego dan urusan pribadi saja.

Dalam tulisan ini, akan mencoba memaparkan secara umum terkait bagaimana kenaikan muka air laut menjadi permasalahan serius yang mengancam negara-negara kepulauan pasifik. Serta bagaimana organisasi regional seperti *Melanesian Spearhead Group (MSG)* dan *Pacific Islands Forum (PIF)* bersama negara-negara anggotanya menyikapi ancaman tersebut. Selanjutnya, menarik juga untuk dibahas mengenai dampaknya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat.

KERANGKA ANALISIS

Green Politics berbeda dengan teori environmentalism. Ernst Haeckel (1873) membedakan antara environmentalism dan green politics. Menurut Haeckel, environmentalism berkenaan dengan perlindungan alam yang sepenuhnya untuk kegunaan umat manusia, sedangkan green politics mengimplikasikan pengadopsian sebuah perspektif geosentrisme (paham yang menyatakan bumi sebagai pusat alam semesta) (Heywood, 2013). Berdasarkan pandangan tersebut, intinya environmentalis melihat bahwa lingkungan hidup ini merupakan sepenuhnya bagi kepentingan umat manusia, sedangkan green politics mempunyai cara pandang manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri. Oleh karena itu, manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungannya (Sri Lestari, 2016). Selain itu, Teori ini pada awalnya muncul untuk mengkritik perspektif liberalisme dan melihat isu-isu nyata ketika perang dingin telah mengakibatkan kerusakan lingkungan secara berlebihan (Jackson & Sorensen, 2013).

Gerakan *environmentalism* dan *green politics* merupakan fenomena menarik dalam kajian sosial politik saat ini karena kedua-duanya saling berkaitan. Hal ini dikarenakan, kedua-dua pemikiran tersebut dapat melahirkan rezim pemerintahan yang arif terhadap permasalahan lingkungan atau dapat melahirkan rezim pemerintahan yang lebih serakah. Berbagai fenomena alam telah membuktikan, bahwa bencana alam yang terjadi tidak hanya kehendak alam semata melainkan semakin berkembangnya campur tangan manusia yang begitu serakah dalam mengeksploitasi lingkungan hidup yang bersembunyi dibelakang agenda pembangunan negara yang mengejar kepentingan kapitalisme dan ekonomi global (pembangunan negara) (Sri Lestari, 2016).

Kate O'Neil (dalam Bukunya Jackson & Sorensen, 2013) mengatakan bahwa jika keamanan internasional dan perekonomian global adalah dua area isu terdisional utama dalam politik dunia, sebagai seorang pakar beliau menyatakan bahwa lingkungan telah muncul sebagai isu utama ketiga (Jackson & Sorensen, 2013). Teori ini sebetulnya semacam hasil refleksi pemikiran para tokoh penstudi hubungan internasional dalam menghadirkan perspektif baru pada kajian global. Kajian awalnya yang hanya berfokus terhadap fenomena-fenomena yang identik dengan perang dan segala implikasinya, menjadi fokus kajian lain yang sebetulnya tidak kalah penting. Masih dalam bukunya Jackson & Sorensen, dijelaskan bahwa Teori Hijau ini muncul dan turut hadir untuk memberikan pandangannya dalam Hubungan Internasional sejak tahun 1960-an atau sekitar abad ke-20 (Arya Seta, 2015).

Lebih lanjut Paterson (dalam Burchill, 2001) menjelaskan bahwa Green Politics atau Teori Hijau juga memiliki asumsi-asumsi yang mendasarinya. Asumsi yang pertama yakni kaum ini lebih mengacu pada terhadap penolakan konsep *anthropocentric* atau *human-centered*. Konsep yang dimaksud yakni bahwa segala kebaikan yang ada di alam hanya berpusat pada manusia, sehingga adanya konsep *anthropocentric* ini akan membuat manusia cenderung untuk bertindak eksploitatif dengan berlebihan terhadap alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, perspektif teori hijau ini menolak akan konsep *anthropocentric* tersebut karena dianggap merugikan kondisi alam. Asumsi yang kedua yakni pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan mengakibatkan lahan yang ada di alam semakin berkurang karena dijadikan tempat tinggal. Selain itu, semakin bertambahnya populasi manusia juga akan berpengaruh terhadap sumber daya alam yang ada di alam. Oleh karena itu, pembangunan lahan dan pengelolaan sumber daya alam harus disesuaikan serta harus dirawat dan dilestarikan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga dengan baik dan tidak merugikan lingkungan. Asumsi yang ketiga yakni konsep desentralisasi. Teori ini mempercayai bahwa jika dalam suatu negara terdapat banyak anggota penduduk di dalamnya maka untuk mencapai lingkungan yang lestari atau perbaikan lingkungan tidak akan terwujud, dibutuhkan komunitas yang lebih kecil atau pendesentralisasian dalam mewujudkan perbaikan lingkungan. Teori ini beranggapan bahwa dengan adanya komunitas lokal yang lebih kecil dari negara maka diharapkan dapat memberikan perlindungan dan perawatan terhadap lingkungan (Burchill dalam Arya Seta, 2015).

Teori ini juga lebih melihat dari sisi bagaimana aktivitas yang dilakukan manusia dapat memiliki pengaruh pada lingkungan yang ada pada lingkungan sekitarnya, serta bagaimana aktivitas manusia dapat memiliki dampak hingga melewati batas-batas negara (Arya Seta, 2015). Dalam berbagai forum di dunia, baik tingkat regional maupun internasional, telah banyak yang mengangkat isu lingkungan sebagai pokok utama pembahasan dalam forum tersebut. Ini membuktikan bahwa isu lingkungan merupakan hal sudah menjadi objek pembahasan utama dalam berbagai persoalan dunia internasional. Dalam melihat kondisi dunia tersebut, perlu adanya pergeseran dari isu-isu *mainstream* seperti peperangan, ekonomi politik, hingga terorisime – yang sebetulnya tidak begitu pasti potensi terjadinya – kepada isu lingkungan yang perlahan namun pasti mengancam eksistensi kita sebagai manusia di dunia ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam rangka mencoba menjawab pertanyaan penelitian adalah dengan cara mengkaji berbagai literatur yang bersumber dari jurnal-jurnal, artikel, hingga buku-buku yang sekiranya diperlukan dalam melengkapi tulisan ini. Sehingga menjadikan tulisan ini menjadi kaya akan perspektif dan argumen, namun tetap selaras dengan tujuan utama tulisan ini.

PEMBAHASAN

Potensi Tenggelam Kian Nyata

“land is life, without land there is no life” sebuah pepatah yang penting yang dikenal masyarakat adat di kawasan Pasifik Selatan (Kwa, 2012). Pepatah tersebut diyakini oleh masyarakat setempat agar senantiasa menjaga tanah mereka dari rongrongan musuh yang bisa kapan saja merampasnya. Akan tetapi pepatah tersebut ditantang oleh musuh baru, yakni kenaikan muka air laut sebagai salah satu dampak dari perubahan iklim. Berbeda dengan masa lalu dimana masyarakat adat tahu siapa musuhnya sehingga mereka bisa menyusun rencana strategis untuk melawan musuh tersebut. Kini, perubahan iklim menjadi musuh bersama bagi mereka yang sama sekali tidak dikenal. Namun siap kapan saja menyerang mereka. Ancaman ini tidak bisa sepenuhnya mereka pahami atau jelaskan tapi ancaman baru ini perlahan namun pasti mengancam kehidupan mereka.

Ada beberapa skenario untuk memproyeksikan kenaikan muka air laut di Pasifik. Berdasarkan skenario-skenario tersebut, rata-rata peningkatan tinggi permukaan air laut berkisar antara 8 – 13 cm pada tahun 2030, 17 – 29 cm pada tahun 2050 dan antara 82 cm pada 2100 (Hemming, D. et al., 2007 dalam Riza Hanafi, 2014). Bahkan proyeksi terburuk *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyebut angka terburuk pada tahun 2100 adalah 95 cm (Burns, 2003 dalam Riza Hanafi, 2014). Sedangkan khusus kawasan kepulauan pasifik sendiri, penelitian tahun 1999 menunjukkan bahwa kenaikan tinggi permukaan air laut tersebut adalah 25 milimeter atau 2.5 cm per tahun yang lebih dari sepuluh kali lipat trend kenaikan global (Burns, 2003 dalam Riza Hanafi, 2014).

Meningkatnya kenaikan muka air laut ini juga memicu intrusi air laut ke darat. Dimana air laut yang meningkat menyebabkan gelombang meningkat dan menyampuri air tawar yang ada di darat. Kondisi ini tentunya bisa menyebabkan permasalahan tersendiri bagi warga yang tinggal di pulau. Akibat, warga menjadi kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari mengingat air bersih merupakan kebutuhan primer setiap manusia.

Dalam sebuah laporan yang bersumber dari *Asian Development Bank* (ADB) juga memaparkan beberapa risiko dan kerentanan negara kepulauan pasifik terhadap perubahan iklim (ADB, 2012; Omega Wati, Vrameswari. Risadi Apresian, Stanislaus. dan A Satya Dewi, 2018).



Dari data tersebut, didapatkan bahwa *sea level rise* sebagai salah satu risiko yang paling rentan. Oleh karena itu, kenaikan muka air laut (ancaman tenggelam) mendapatkan perhatian yang lebih. Bahkan ADB juga mengkategorikan hal ini sebagai keadaan yang ekstrim.

“The survival of Pacific island countries is at extreme risk from sea-level rise. Many are only a few meters above sea level, and more than half the population live within 1.5 kilometers of the shore. A sea level increase of as little as half a meter, along with increased incidents of storm surges, would threaten livelihoods. Low-lying islands and mountainous islands are equally vulnerable to sea-level rise due to the concentrated human activity in coastal areas and the difficulty of relocating populations to the interior of high islands (ADB, 2012; Omega Wati, Vrameswari. Risadi Apresian, Stanislaus. dan A Satya Dewi, 2018)”

Selain itu, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh J. Scott Hauger, negara-negara kepulauan seperti di Pasifik sangat rentan terhadap dampak buruk yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Dampak lainnya yang bisa dirasakan oleh negara-negara itu antara lain: berkurangnya akses terhadap air bersih, pasokan makanan, dan kerusakan infrastruktur pesisir (Hauger 2015). Hal ini tentu akan membuat instabilitas pada kawasan. Terlebih, penduduk asli Pasifik sangat bergantung pada hasil alam (tanah dan laut). Bahkan, di kawasan ini

penduduk menguasai 90% tanah dan hanya 10% tanah yang dimiliki oleh negara (Kwa, 2012). Kesadaran bahwa wilayah yang mereka tinggal merupakan kawasan kepulauan yang lebih banyak wilayah perairan ketimbang daratan, maka setiap jengkal tanah (daratan) begitu berarti dan mereka akan menjaganya dari berbagai ancaman. Salah satu pemanfaatan tanah oleh masyarakat Pasifik adalah dengan menjadikan lahannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka memang terampil dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Buktinya sejarah menyebutkan bahwa penduduk asli Pasifik telah mengembangkan teknik berkebun dan memancing yang sangat canggih yang telah terbukti selama berabad-abad (See, Ketan J. and Muke, 2001).

Permasalahan *Climate Change Refugees*

Penggunaan istilah pengungsi akibat krisis iklim sebagai *Refugees* didasarkan pada pertimbangan para aktivis yang tujuannya untuk membebaskan tekanan pada urgensi atas isu tersebut. Mereka khawatir penggunaan istilah selain *refugee* dapat menurunkan keseriusan dari tingkat situasi orang-orang tersebut (Brown, 2008 dalam Riza Hanafi, 2015). Sedangkan setelah kata *refugees*, ada beberapa pendekatan yang berbeda dalam menamainya, seperti *environmental refugees* dan *climate refugees*. Tapi intinya dari berbagai terminologi tersebut, istilah *refugees* tetap dipertahankan sebagai bukti keseriusan dari permasalahan dan isu ini. Hal ini dikarenakan secara hukum, definisi mengenai *refugees* ini ditautkan berdasarkan Pasal 1 Huruf A (2) Konvensi tentang Pengungsi. Berdasarkan sejarah, kemunculan konvensi ini merupakan bentuk pengakuan terhadap adanya krisis pengungsi dan perlunya kerja sama antar negara dalam mengatasinya (Riza Hanafi, 2015).

Semakin meningkatnya permukaan air laut sebagai akibat dari perubahan iklim dan degradasi lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan populasi global dan ini masih terus meningkat (Ratih Kumala Dewi, 2017). Profesor Norman Myers dari Universitas Oxford memperingatkan bahwa jika pada tahun 2050 akan ada 200 juta orang yang terkena dampak gangguan musim, hujan lebat dan cuaca ekstrim lainnya, atau kekeringan jangka panjang yang tak terduga, dan juga terkena dampak dari kenaikan permukaan laut dan banjir. "Dalam keputusan, orang-orang akan mencari perlindungan di tempat lain," kata Myers: "Tidak semua dari mereka meninggalkan negaranya, banyak dari mereka pindah ke wilayah lain yang masih berada pada negaranya, tapi jelas mereka semua meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk sementara waktu, jika mereka tidak dapat pindah

secara permanen, dengan harapan bisa kembali ke tanah kelahiran mereka" (Norman, 2005 dalam Ratih Kumala Dewi, 2015).

Ancama tenggelam, merupakan hal yang sangat dikhawatirkan oleh negara-negara kepulauan pasifik. Ancaman ini perlahan namun pasti menghantui keberlangsungan hidup mereka sebagai sebuah bangsa dan negara. Apabila hal tersebut terjadi, tentunya tidak baik. Bukan hanya bagi negara-negara kepulauan pasifik, tapi juga bagi negara-negara lain di sekitarnya, seperti Australia, Selandia Baru dan Bahkan Indonesia. Tidak hanya berdampak secara fisik pada lingkungan namun perubahan iklim ini juga akan membawa dampak sosial. Dampak sosial yang diakibatkan oleh kenaikan permukaan air laut sering ditangani melalui prediksi masa depan. Di seberang Pasifik, ratusan ribu orang cenderung bermigrasi pada dekade berikutnya karena kondisi ini. Kebanyakan dari mereka diharapkan untuk pergi ke negara terdekat yang lebih mapan dan terbuka, di mana banyak penduduk Kepulauan Pasifik sudah menetap. Karena berhubungan dengan negara lain, kekhawatiran tentang *'environmental migrant'* telah menjadi topik politik yang nyata (Ratih Kumala Dewi, 2017).

Peran PIF dan MSG

Tidak ada keraguan bahwa masyarakat adat Pasifik Selatan menghadapi ancaman nyata perubahan iklim dan bahwa keberadaan mereka bergantung pada kebijakan dan hukum yang inovatif imperatif baik di tingkat domestik dan regional. Paling tidak, organisasi regional perlu merespon dua hal terkait hal ini, pertama dan yang adalah melakukan perumusan strategi terkait aksi yang akan dilakukan oleh organisasi regional yang sifatnya terpadu serta melakukan pertanggungjawaban yang sifatnya transaksional terhadap pihak lain, termasuk negara-negara yang selama ini dianggap paling banyak melakukan kerusakan lingkungan (Kwa, 2012). Kedua, membuat kebijakan mengenai perubahan iklim yang terintegrasi untuk diimplementasikan di internal kawasan. Menghadapi kenyataan ini, negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan pun mengambil langkah. Pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-44 *Pacific Islands Forum* (PIF) yang diadakan di Majuro, Marshall Islands. Pada tanggal 5 September 2013, negara-negara kawasan pasifik selatan mendeklarasikan *Majuro Declaration*. Deklarasi ini adalah sebuah pertanyaan sekaligus komitmen negara-negara Kepulauan Pasifik untuk memimpin isu perubahan iklim (*climate leader*). Melalui deklarasi ini negara-negara kepulauan pasifik berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Deklarasi ini ironis karena negara-negara kepulauan pasifik adalah kelompok negara dengan emisi gas rumah kaca terkecil di dunia (Riza Hanafi,

2014). Namun, meskipun dengan dengan tingkat emisi yang minim, upaya yang mereka lakukan melalui *Majuro Declaration* ini merupakan sebuah tindakan yang bisa berdampak besar bagi gerakan penanggulangan pemanasan global. Deklarasi yang terdiri dari 17 poin ini dibagi menjadi tiga bagian.

Bagian pertama menjelaskan tentang ancaman perubahan iklim secara umum; Sementara bagian kedua membahas tentang tanggung jawab negara-negara PIF untuk bertindak mengatasi masalah tersebut dan Bagian ketiga adalah bagian penting dari deklarasi ini karena pada bagian tersebut ditegaskan komitmen negara-negara PIF untuk menjadi pemimpin dalam isu perubahan iklim (Communique, 2013).

Majuro Declaration merupakan usaha negara-negara kepulauan pasifik untuk mendapat perhatian dunia, baik oleh negara lain maupun juga oleh masyarakat internasional secara umum. Situasi dan kondisi akibat perubahan iklim harus mereka hadapi karena hal tersebut menghantui kelangsungan hidup mereka. Di negara-negara kepulauan pasifik, isu perubahan iklim dan pemanasan global bukan hanya sekedar isu ekonomi dan politik yang bisa "digoreng" untuk kepentingan kelompok tertentu sebagaimana yang selama ini sering terjadi di berbagai negara di dunia, melainkan menjadi semacam *common problem* karena menyangkut kelangsungan hidup bagi penduduk di kawasan ini.

Selain PIF, pihak yang turut aktif dalam menghadapi ancaman lingkungan kenaikan muka air laut di kepulauan negara-negara pasifik adalah MSG. Sesuai dengan namanya, MSG merupakan organisasi regional yang di dalamnya tergabung negara-negara pasifik dengan ras melanesia. Meskipun demikian, pada tahun 2018 Indonesia resmi bergabung dengan MSG. Bergabungnya Indonesia dengan MSG menuai protes dari negara anggota MSG lain. Contoh yang paling lantang menolak bergabungnya Indonesia dengan MSG adalah Vanuatu. Negara ini menganggap bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM terhadap orang-orang melanesia yang berada di Indonesia, tepatnya di Papua. Oleh karena itu, Vanuatu juga dengan keras menyuarakan dukungannya terhadap kemerdekaan bagi warga Papua. Dalam artian, mereka mendukung kemerdekaan papuan untuk lepas dari Indonesia. Upaya ini mereka wujudkan melalui deklarasi pada forum-forum internasional. Meskipun menuai penolakan dari Vanuatu, negara anggota MSG lainnya seperti Fiji justru mendukung Indonesia untuk bergabung dengan MSG. Perbedaan pendapat diantar keduanya memang menarik, sarat akan kepentingan nasional kedua negara masing-masing.

Kebijakan MSG yang menerima Indonesia untuk bergabung merupakan kebijakan yang logis. Walau sebetulnya mereka juga mestinya kecewa dengan apa yang dituduhkan

oleh Vanuatu terhadap Indonesia terkait isu HAM, namun mereka mampu bersikap dewasa dengan mengesampingkan emosi kedekatan rasial mereka. MSG berkepentingan untuk dekata dengan Indonesia mengingat paru-paru dunia saat ini salah satunya berada di Indonesia. Oleh karena itu, melalui kedekatannya dengan Indonesia, MSG mengaharap Indonesia lebih *aware* terhadap hutan dan lingkungan. Supaya laju kenaikan muka air laut dapat diredam. Jadi, dalam hubungan antara Indonesia dengan MSG sebetulnya relasi atas dasar kepentingan bersama. Indonesia berkepenitngan untuk mendapatkan dukungan dari MSG terkait permasalahan kelompok separatis bersenjata di Papua, sedangkan MSG berekepntingan agar Indonesia lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hutan yang dimilikinya agar negara-negara di kepulauan pasifik tidak lekas tenggelam akibat kenaikan muka air laut.

SIMPULAN

Tenggelam, kondisi yang selama ini menjadi ancaman bagi negara-negara di Kepulauan Pasifik ternyata memang benar adanya. Perlahan namun pasti kondisi tersebut niscaya terjadi apabila dunia tidak mampu menanggulangnya. Semetara itu, apa yang dilakukan oleh manusia alih-alih mencegah atau memperlambat terjadinya, justru malah sebaliknya. Semakin hari kondisi air laut semakin meningkat ketinggiannya. Ketebalan es di kutub semakin menipis dan mencair karena kondisi dunia yang suhunya kian meningkat. Industrialisasi yang tak ramah lingkungan semakin masif terjadi membuat iklim dunia senantiasa berubah sehingga tak jarang menyebabkan *climate disaster* seperti angin kencang dan topan. Serta dampak-dampak lain yang meluas hingga mengganggu berbagai sektor kehidupan manusia, mulai dari sosial, budaya, kesehatan, ketahanan pangan dan lain-lain.

Menyadari hal tersebut, komunitas Pasifik melakukan berbagai upaya sebagai langkah nyata dalam rangka menyelamatkan kehidupan dan masa depan mereka. Mereka harus bersiap jika suatu ketika, tanah di tengah samudera yang selama ini menjadi tempat mereka bertahan hidup, harus hilang dilahap deburan ombak. Jika manusia yang tinggal di belahan bumi lainnya bisa dengan tenang hidup tanpa memikirkan dampak dari setiap kegiatan yang terkadang merusak alam, ada mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil yang hidupnya terancam oleh apa yang bahkan mereka sendiri tidak pernah lakukan. Mereka seolah menjadi korban atas keserakahan manusia lain yang tidak peduli dengan ancaman kenaikan muka air laut yang bisa membuat rumah dan kehidupan mereka ikut tenggelam. Alhasil, jika hari

tenggelam itu benar-benara tiba, mereka harus mengarungi samudera untuk pindah ke negeri sebrang dan menyandang statu *climate changer refugees*.

Berbagai kajian dan penelitian turut dilakukan oleh berbagai komunitas internasional untuk mencari jalan keluar atau paling tidak sebagai tindakan rasa iba terhadap kehidupan mereka. Akan tetapi, keseriusan tidak pernah tercermin dari dari setiap kegiatannya, seperti selalu ada kepentingan terselubungan atas setiap upaya yang katanya untuk kebaikan masyarakat yang tinggal di negara-negara kepulauan Pasifik. Tapi itu dianggap lebih baik ketimbang tidak ada perhatian sama sekali. Intinya, kedepan kehidupan mereka yang tinggal di Pasifik tergantung dari manusia di bumi, apakah kesadaran akan pentingnya mencegah atau paling tidak memperlambat berbagai kerusakan telah benar-benar serius untuk dilakuakn. Jika tidak, yang menjadi ancaman bukan hanya tenggelam bagi masyarakat yang tinggal di pasifik, tapi ancaman kemusnahan bagia setiap kehidupan yang ada di dunia. Oleh karena itu, demi diri sendiri, masyarakat yang tinggal di Pasifik, dan seluruh kehidupan di dunia, marilah tingkatkan kepedulian kita semua terhadap alam dan lingkungan untuk bumi yang lebih ramah bagi setiap penghuninya.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2012). *Pacific Risks, Vulnerabilites, and Key Impacts of Climate Change and Natural Disasters*. Manila.
- Arya Seta, M. (2015). Green Politics dan Teori Hijau Dalam Hubungan Internasional. Retrieved March 23, 2020, from Mochamad Arya Seta Berpacu Menjadi Yang Terbaik website: http://mochamad-arya-seta-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-139042-Teori_Hubungan_Internasional-Green_Politics_dan_Teori_Hijau_dalam_Hubungan_Internasional.html
- Brown, O. (2008). *Migration and Climate Change*.
- Burns, W. (2003). *The Impact of Climate Change on Pacific Island Developing Countries in the 21st Century*. New York: Kluwer Academic Publisher.
- Communique, F. (2013). Forty-Fourth Pacific Islands Forum Majuro.
- Crocombe, R. (2001). *The South Pacific*. Suva: University of the South Pacific.
- Heywood, A. (2013). *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations (fifth edition)* (Fifth; Kamdani. & R. Kusmini P, Eds.). New York: Oxford University Press.
- Kwa, E. L. (2012). *Climate Change and Indigenous People in the South Pacific*. Ottawa.
- Latuconsina, H. (2010). DAMPAK PEMANASAN GLOBAL TERHADAP EKOSISTEM PESISIR DAN LAUTAN. *Jurnal Ilmiah Agribisnis Dan Perikanan (Agrikan UMMU-Ternate)*, Vol. 3 Edi, 30–37.
- Norman, M. (2005). *Environmental Refugees: An Emergent Security Issue*. Prague: 13th Economic Forum.
- Omega Wati, Vrameswari, Risadi Apresian, Stanislaus, dan A Satya Dewi, E. (2018). THE COLLABORATION BETWEEN INDONESIA AND PACIFIC ISLAND COUNTRIES

IN FACING ENVIRONMENTAL CHALLENGES. *Department Of International Relations, Parahyangan Catholic University.*

Ratih Kumala Dewi, P. (2017). Climate Change Will Cause The Next Migrant Crisis : Studi Kasus Kiribati. *Jurnal PIR, Vol.2 No.*, 82–101.

Riza Hanafi, M. (2014). Majuro Declaration: “Kudeta” Kepemimpinan Isu Perubahan Iklim. *Jurnal Transformasi Global, VOL 3 NO 1*, 21–41.

Riza Hanafi, M. (2015). Climate Refugee: Tantangan Bagi Tata Kelola Global. *Jurnal Transformasi Global, Volume 2 N*, 36–50.

See, Ketan J. and Muke, J. (2001). *National Heritage Management: A Site Management Plan for the Kuk World Heritage Project in Papua New Guinea*. Port Moresby: UPNG Press.

Sri Lestari, Y. (2016). ENVIRONMENTALISM DAN GREEN POLITICS: PEMBAHASAN TEORETIS. *Community*, 2, 188–200. Retrieved from <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/137/127>